

KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

Galur Gumelar Tito

NPP. 31.0358

Asdaf Provinsi Jawa Barat

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email : 31.0358@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dr. Ir. H. Dwi Agus Sumarno, MM, M.Si

ABSTRACT

Problem: Poverty is not only related to clothing, food, shelter, and income, but also to low levels of health and education. Furthermore, impoverished communities often lack the power to participate in development. According to data from the Central Statistics Agency, Majalengka Regency is among the top five regencies with a high poverty rate in West Java. The poverty problem in Majalengka Regency is caused by several factors, including a significant number of residents living below the poverty line who generally do not own productive assets such as land, housing, capital, or skills. Additionally, most residents lack the means to acquire productive assets independently. **Objective:** This study aims to understand and analyze the coordination of the local government in reducing the poverty rate in Majalengka Regency. **Method:** This research uses a descriptive qualitative method. According to Arikunto (2010), descriptive research is used to investigate conditions or other matters that have been explained, and the results are presented in the form of research reports. Data collection techniques in this study include interviews, observation, and documentation. The theory used in this thesis is the Coordination Theory by Ndraha (2015:297), which explains the factors leading to coordination. The dimensions of coordination include Communication, Awareness of the Importance of Coordination, Agreement and Commitment, Coordination Incentives, Competence, and Feedback. **Results:** The coordination undertaken by the local government of Majalengka Regency has not been well implemented. The role of the Social Services Department in coordinating with the community is still inadequate, with many discrepancies occurring among the parties involved. **Conclusion:** Poverty in Majalengka Regency is a serious issue that needs to be addressed by the local government. The lack of awareness among the community and local government hinders the distribution of both cash and non-cash assistance. Efforts made include the Social Services Department forming a supervisory team for village governance to oversee the administration of government activities.

Keywords: Local Government, Poverty, Coordination

ABSTRAK

Permasalahan : Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan sandang, pangan, papan dan pendapatan, namun juga berkaitan dengan rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan serta masyarakat miskin yang tidak berdaya untuk ikut serta dalam Pembangunan, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka termasuk bagian dari lima besar kabupaten yang memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi di Jawa Barat, Masalah kemiskinan di Kabupaten Majalengka diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya penduduk yang masih dibawah garis kemiskinan dan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti lahan produksi atau tempat tinggal, modal dan keterampilan. Selain itu, penduduk pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan usaha sendiri. **Tujuan** : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa kordinasi pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka. **Metode** : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, (Arikunto, 2006) mengatakan bahwa Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk mencari tau tentang keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah dijelaskan, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian, dalam pengumpulan data peniliti menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam skripsi ini yaitu teori Koordinasi (Ndraha, 2015:297) yang menjelaskan faktor-faktor terjadinya koordinasi adapun dimensi yang terdapat 6 yaitu, Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Kordinasi, Kesepakatan dan Komitmen, Insentif Koordinasi, Kompetensi, dan Feedback. **Hasil** : Kordinasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka belum terlaksana dengan baik , peran Dinas Sosial dalam kordinasi dengan masyarakat belum berjalan dengan baik masih banyak terjadinya penyimpangan antara masing-masing pihak. **Kesimpulan** : Kemiskinan di Kabupaten Majalengka merupakan masalah yang amat perlu diatasi dengan serius oleh pemerintah daerah, kurangnya

kesadaran dari masyarakat dan pemerintah daerah menyebabkan terhambatnya pemberian bantuan tunai maupun non tunai, upaya yang dilakukan yaitu Dinas Sosial membentuk tim pengawas Pemerintahan Desa untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Kemiskinan, Kordinasi,

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan sandang, pangan, papan dan pendapatan, namun juga berkaitan dengan rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan serta masyarakat miskin yang tidak berdaya untuk ikut serta dalam pembangunan. Menurut Bambang Rustanto (2015:2) kemiskinan dapat diartikan suatu keadaan dimana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimum sehari-hari. Secara garis besar kemiskinan dapat dipahami sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks di dalam suatu negara. Kemiskinan menjadi masalah yang cukup serius, tidak hanya berkaitan dengan ekonomi tetapi akan berdampak pada permasalahan sosial. Ketika angka kemiskinan meningkat hal ini membuat angka kriminalitas juga meningkat. Hal ini membuat masalah kemiskinan menjadi permasalahan sosial yang stratifikasi dalam Masyarakat luas. Bertambahnya angka kemiskinan menjadi pekerjaan tersendiri bagi Pemerintah Daerah, secara tidak langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 dijelaskan bahwa urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pelayanan pada pemerintah daerah. Urusan kongruen yang dibagi dalam 2 urusan yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Sementara, urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar menjadi urusan yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Masalah kemiskinan di Kabupaten Majalengka diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya penduduk yang masih dibawah garis kemiskinan dan pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti lahan produksi atau tempat tinggal, modal dan keterampilan. Selain itu, penduduk pada umumnya tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan usaha sendiri. Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah juga mengakibatkan tingginya angka kemiskinan. Tingkat pendidikan rendah ini terjadi akibat mereka dahulu tidak melaksanakan proses belajar dengan baik pada masa sekolah. Akibat tingkat pendidikan yang rendah akan sulit untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Banyak diantara mereka menjadi buruh, tani dan atau bekerja dengan musiman, hal tersebut diperlukannya kordinasi Prof. Dr. Mr. S. Prajudi atmosudirdjo menyebutkan dalam "Dasar- dasar Ilmu Administrasi (1979:172) *Coordinating*

yaitu membuat segala sesuatu, terutama unit-unit kegiatan organisasi, berjalan secara serempak, *integrative*, dan sinkron. Pernyataan itu agak sama dengan pernyataan Drs. The Liang Gie dan Drs. Sutarto dalam “Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi (1978:16)” bahwa pengkoordinasian adalah kegiatan menghubungkan-hubungkan orang-orang dan tugas-tugas sehingga terjamin adanya kesatuan atau keselarasan keputusan, kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap serta tercegah timbulnya pertentangan, kekacauan, kekembaran dan kekosongan tindakan. Diperlukan kebijakan public yang sesuai dengan masalah yang ada menurut (Subianto, 2020) Kebijakan publik merupakan suatu rencana tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Kebijakan publik ini dapat berupa regulasi, program, atau tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil

Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka diakibatkan karena kurangnya kesadaran dari masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat, kurangnya pengawasan dari bagian internal menyebabkan anggaran tidak tersalurkan dengan baik dan target yang membutuhkan tidak terpenuhi, hal tersebut diakibatkan masih belum optimal kordinasi antara pemerintah daerah Kabupaten Majalengka

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari dan mengambil bahan referensi dari beberapa penelitian terdahulu. Hasil Penelitian pertama yang dilakukan oleh (Siti Hajra, 2022) yang berjudul Penang gulangan kemiskinan : antara Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam) teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori ekonomi mikro, metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, hasil dari penelitian ini ialah pemerintah dan masyarakat dapat mengatasi kemiskinan dan merasakan kemajuan diantaranya perbaikan rumah, pemberian bantuan mesin jahit, Penelitian kedua yang dilakukan oleh (Hartanti Widayani, 2013) yang berjudul Upaya penanganan kemiskinan serta keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sleman dalam penelitiannya menggunakan teori dari soerjono soekanto, hasil dari penelitian ini berhasil menghasilkan kegiatan pembinaan usaha dan peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera yang efektif menurunkan kemiskinan, Penelitian ketiga yang dilakukan oleh (Suprizal R, 2019) yang berjudul strategi pemerintahan daerah dalam mengatasi kemiskinan di Desa Teluk Pulau, teori yang digunakan ialah teori strategi, hasil yang di dapatkan ialah pemerintah daerah melakukan berbagai macam strategi dalam mengatasi masalah kemiskinan di daerah tersebut, Penelitian keempat oleh (Dewi Astari, 2021) yang berjudul Pemerintah Daerah dan Problem Kemiskinan Analisis Ekonomi Politi katas Status Kebumen sebagai Kabupaten Termiskin di

Jawa Tengah pada 2019, metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara pengumpulan data yang dilakukan memakai Teknik dokumentasi dan wawancara. Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis data induktif, Hasil penelitian memperlihatkan faktor yang menjadikan Kebumen sebagai kabupaten termiskin di Jawa Tengah pada 2019 adalah faktor kebijakan yang menyebabkan belum adanya sinergi yang maksimal antara kebijakan di bidang ekonomi, Penelitian kelima oleh (Nurul Huda, 2013) yang berjudul Peranan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi di Kabupaten Bondowoso), Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa, Program kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso dilaksanakan bekerjasama lintas organisasi dengan Dinas-Dinas terkait lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai bentuk program Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. Faktor yang mendukung sosialisasi program keluarga harapan adalah adanya dukungan pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso sangat besar terhadap program keluarga harapan yaitu bekerja sama dengan pemerintah pusat. Selain pemerintah adanya juga dukungan dari tokoh masyarakat setempat khususnya. Dengan adanya dukungan dari pemerintah maka proses sosialisasi Program keluarga Harapan akan lebih cepat kepada rumah tangga sangat miskin karena dalam pranata sosial tokoh masyarakat mempunyai peran yang sangat penting sebab mereka menjadi tokoh yang pendapat pendapatnya sering didengar oleh masyarakat, menjadi panutan dan dihormati. Faktor lain yang mendukung adalah adanya instansi pemerintah yang lain yang bisa diajak bekerja sama untuk mensosialisasikan program keluarga harapan. Mengenai faktor penghambat dalam sosialisasi program keluarga harapan oleh kurangnya pemahaman rumah tangga sangat miskin tentang pentingnya program ini bagi mereka, hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat pengetahuannya masih rendah, Penelitian Keenam oleh (Listya Nihayatun Nsiehah, 2023) yang berjudul Strategi Pemerintah Kota Depok dalam Mengatasi Kemiskinan di Masa Pandemi Covid-19, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi untuk memberikan Gambaran permasalahan yang terjadi, teori yang digunakan yaitu teori Fred. R David untuk melihat manajemen strategi. Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa, Program kegiatan pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bondowoso dilaksanakan bekerjasama lintas organisasi dengan Dinas-Dinas terkait lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai bentuk program Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. Faktor yang mendukung sosialisasi program keluarga harapan adalah adanya dukungan pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso sangat besar terhadap program keluarga harapan yaitu bekerja sama dengan pemerintah pusat. Selain pemerintah adanya juga dukungan dari tokoh masyarakat setempat khususnya. Dengan adanya dukungan dari pemerintah maka proses sosialisasi Program keluarga Harapan akan lebih cepat kepada rumah tangga sangat miskin

karena dalam pranata sosial tokoh masyarakat mempunyai peran yang sangat penting sebab mereka menjadi tokoh yang pendapat pendapatnya sering didengar oleh masyarakat, menjadi panutan dan dihormati. Faktor lain yang mendukung adalah adanya instansi pemerintah yang lain yang bisa diajak bekerja sama untuk mensosialisasikan program keluarga harapan. Mengenai faktor penghambat dalam sosialisasi program keluarga harapan oleh kurangnya pemahaman rumah tangga sangat miskin tentang pentingnya program ini bagi mereka, hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat pengetahuannya masih rendah

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu semua lokus yang ada di penelitian terdahulu untuk bahan referensi berbeda dengan hasil penelitian peneliti yang dilakukan di Kabupaten Majalengka, selain itu teori yang digunakan berbeda, peneliti menggunakan teori Koordinasi (Ndraha, 2015:297) yang menjelaskan faktor-faktor terjadinya koordinasi adapun dimensi yang terdapat 6 yaitu, Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Kordinasi, Kesepakatan dan Komitmen, Insentif Koordinasi, Kompetensi, dan Feedback.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana kordinasi antara pemerintah daerah dan masyarakat di Kabuaten Majalengka dalam mengtasi kemiskinan, kendala apa saja dalam pelaksanaan dan Solusi untuk mengatasi masalah tersebut, diharapkan kedepannya bisa menjadi bahan referensi untuk membuat kebijakan yang baru untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

II. Metode

Metode penelitian dalam mengkaji penlitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, Metode penelitian ini memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel yang berarti penelitian yang menyesuaikan dengan kenyataan yang ada pada Lokasi tempat penelitian sehingga data yang didapatkan dapat diinterpretasikan, menurut (Sugiyono, 2019: 16) Metode Penelitian kualitatif disebut juga metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut sebagai metode interpartive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Menurut (Simangungsong, 2017: 190) lebih lanjut menggambarkan penlitian kualitatif sebagai penelitian yang bersifat partisipatif dengan desain yang fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan gejala yang ditemukan di lapangan sesuai keadaan yang sebenarnya

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kordinasi Pemerintah Daerah Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat

1. Komunikasi

Terdapat komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan Pemerintah Desa dan masyarakat. Narasumber setuju jika komunikasi sangat penting dalam berkoordinasi. Pimpinan instansi sudah berkomitmen dan juga menjalin hubungan baik dengan instansi lain sehingga apabila ada permasalahan akan direspons dengan cepat. sukses tidaknya suatu kordinasi ini harus diawali dengan komunikasi yang baik secara lisan maupun tertulis.

2. Kordinasi

Pelaksanaan koordinasi pada setiap *job-desk* sudah baik didalam maupun diluar Dinas Sosial Kabupaten Majalengka. Masing-masing bidang yang ada saling membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan melalui rapat Koordinasi. Saran yang dapat disampaikan adalah mempertahankan pelaksanaan koordinasi yang telah berjalan dengan baik. dan meningkatkan kinerja pegawai agar kedepannya terdapat peningkatan.

3. Komitmen dan Kesepakatan

sering dilakukan pertemuan yang sifatnya formal, yaitu dengan melakukan rapat. Tetapi agenda pertemuan yang dilakukan secara informal juga ada yang biasanya dilakukan secara insidental ketika berada dilapangan. Selain rapat, dilakukan juga koordinasi dengan surat menyurat yang tentunya dengan bahasa kan ketentuan surat formal.

4. Insentif Kordinasi

ada insentif bagi para pelaksana kegiatan koordinasi. Tetapi kembali kepada dinas masing-masing diadakan atau tidaknya sistem *Reward*. Terdapat *reward* yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kedisiplinan yang telah ditunjukkan oleh para pelaksana koordinasi.

5. Kompetensi

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Majalengka sudah sangat mumpuni karena sebagian besar memang memiliki disiplin ilmu yang sesuai. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari adanya sekolah kedinasan di bawah Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dipersiapkan untuk menjadi tenaga terampil di Dinas Sosial

6. *Feedback*

Respon yang diberikan masyarakat kurang baik terhadap upaya pemerintah baru-baru. Masyarakat menginginkan memperbanyak kegiatan penyuluhan walau ada media sosial lama instagram Dinas Sosial tapi sebagian dari mereka tidak mampu untuk membeli alat komunikasi.

3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

faktor yang mendukung dari dalam yaitu komunikasi yang baik, yang terjalin antar pelaksana koordinasi baik didalam maupun diluar Dinas Sosial. Hubungan baik yang terjalin dapat meningkatkan kebiasaa kerja yang baik pula karena saling mendukung didalamnya. Adanya komitmen seberapa serius untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif, bersama dengan pihak eksternal.

2. Faktor Penghambat

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Majalengka menyatakan bahwa “Keterbatasan kami adalah jumlah personil yang ada di Dinas kami .kami belum membentuk tim pengawasan pendataan kemiskinan yang bertugas untuk mengawasi jalannya Pemerintah Desa untuk mendata kemiskinan, InsyaAllah kedepannya apabila tidak ada halangan akan kami segera bentuk

3.3. Upaya Pemerintah Kabupaten Majalengka

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka adalah :

1. Memperkuat Koordinasi baik kepada Pemerintah Desa maupun kepada masyarakat.

Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Majalengka semestinya memperkuat koordinasi baik itu dengan Pemerintah Desa ataupun dengan masyarakat. Karena Dalam sebuah permasalahan semua aspek yang berhubungan perlu saling berkoordinasi baik itu dimulai dengan pembahasan permasalahan, perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaan kegiatan. Seperti dalam pelaksanaan pengentasan kemiskinan Di Kabupaten Majalengka Dinas Sosial perlu berkoordinasi dengan Pemdes dalam pembuatan tim khusus Bagian Pengawasan Pemerintah Desa Yang bertugas untuk mengawasi Pemerintah Desa baik dari awal pendataan masyarakat miskin sampai dengan pemberian bantuan baik dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah itu sendiri

2. Membuat sosialisasi Pentingnya Wajib belajar 12 Tahun

Dinas Sosial Kabupaten Majalengka berkoodinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan sosialisasi wajib belajar 12 tahun melalui penyuluhan ke setiap desa, melalui iklan layanan masyarakat, dan menyuarakan ajakan melalui media sosial kepada orang tua untuk menyekolahkan anak – anaknya dengan sasaran dimulai dengan anak

usia sekolah (6/7tahun) dikarenakan pendidikan adalah salah satu permasalahan yang membuat banyaknya masyarakat jatuh miskin.

3. Pemberdayaan UMKM .

Dinas Sosial Kabupaten Majalengka berkoordinasi dan berkollaborasi dengan Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Majalengka untuk menciptakan Unit Pelatihan Kerja (UPT) dan mengalokasikan anggaran lebih untuk memfasilitasi masyarakat untuk menerima pelatihan kerja terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan tergolong dalam kategori masyarakat miskin ekstrim

3.4. Diskusi Temuan Penelitian Utama

Penanganan dalam kemiskinan tiap daerah selalu memiliki caranya yang berbeda seperti hal temuan oleh (Siti Hajra,2022) dalam mengtasi kemiskinan menggunakan perspektif ekonomi islam pemerintah dapat menjadikannya sebagai bahan referensi dalam pembentukan kebijakan untuk kedepannya, dalam penelitian yang dilakukan Oleh (Hartatnti Widyani, 2013) startegi yang dilakukan yaitu menggunakan kegiatan pembinaan usaha peningkatan pendapatan keluarga Sejahtera yang efektif dan menurunkan kemiskinan, sedangkan pernasalahan yang ditemukan dalam penelitian peneliti yang dilakukan di Kabupaten Majalengka ialah kurangnya kordinasi antara pemerintah dan masyarakat yang mengakibatkan tidak tepatnya sasaran penyaluran bantuan terhadap keluarga miskin.

IV. Kesimpulan

1. Peran Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dalam koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat belum berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya. Masih banyak terjadinya penyimpangan antara masing-masing pihak.
2. Faktor hambatan yang mempengaruhi Pemerintah Daerah dalam berkoordinasi untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka adalah masih kurangnya kesadaran baik Antara Pemerintah daerah maupun kepada masyarakat sehingga terjadinya ketimpangan bagi pendataan masyarakat miskin dan pemberian bantuan tunai ataupun non tunai oleh oknum oknum nakal.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas sosial adalah diantaranya membentuk Tim Pengawas Pemerintah Desa untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemerintahan.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu, idealnya membutuhkan setidaknya tiga bulan untuk mendapatkan hasil yang maksimal tetapi Lembaga hanya memberikan waktu dua minggu

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*) : Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian oleh karena itu peneliti memberikan saran kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka, agar kedepannya dapat diperhatikan dan dapat menjadi bahan pembentukan sebuah kebijakan

V. Ucapan Terimakasih

Bapak Dr. Hadi Prabowo, M.M selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Halilul Khairi, M.Si selaku Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Asep Hendra, SE, MM selaku Ketua Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Ir. H. Dwi Agus Sumarno, M.Si selaku Dosen Pembimbing atas dedikasinya yang tulus ikhlas dengan tanpa lelah membimbing dan membagikan ilmunya kepada peneliti dalam menyusun Skripsi ini, Seluruh Dosen Pengajar, Pelatih, Pamong Pengasuh, dan juga Civitas Akademika IPDN yang telah memberikan jasa serta dedikasinya dalam pembelajaran selama melaksanakan pendidikan, Keluarga Peneliti

VII. Daftar Pustaka

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

Atmosudirjo, P. (1979). *Dasar-dasar Ilmu Administrasi*

Sutarto, Gie. (1978). *Pengertian Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*

Rustanto, B. (2015). *Menangani Kemiskinan*.

Ndraha, T. (2015). *Teori Budaya Organisasi*. Rineka Cipta.

Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Brilliant.

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Alfabeta.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta

Hajra, S. (2022). *Penanggulangan kemiskinan : Antara Pemerintan dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)*
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3460/>

Widyani, H. (2013). *Upaya Penanganan Kemiskinan serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Sleman*
<https://eprints.uny.ac.id/22056/>

Suprizal, R (2019). *Strategi Pemerintahan Daerah dalam mengatasi Kemiskinan di Desa Teluk Pulau*
<https://core.ac.uk/download/pdf/288923341.pdf>

Astara, D. (2021). *Pemerintah Daerah dan Problem Kemiskinan Analisis Ekonomi Politi katas Status Kebumen sebagai Kabupaten Termiskin di Jawa Tengah pada 2019*
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60718>

Huda, N. (2013). *Peranan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kemiskinan Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Studi di Kabupaten Bondowoso)*
<https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58825>

Nsiehah, L. N. (2023). *Strategi Pemerintah Kota Depok dalam Mengatasi Kemiskinan di Masa Pandemi Covid-19*
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/73785/1/LISTYA%20NIHAYATUN%20NASIEHAH.FISI.P.pdf>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12

